

CERAI GUGAT KARENA PENGANIAYAAN DAN KEKERASAN SEKSUAL
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh)

Oleh:

ANNISA CRYSAINTI
E1A020133

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sebuah peristiwa yang sakral bagi manusia yang melangsungkannya. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis, menciptakan suasana bahagia, serta mencapai ketenangan dan kenyamanan bagi suami, istri, dan anggota keluarga lainnya, namun pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan. Pada Putusan Pengadilan Agama Labuha Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh, Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang disebabkan karena Tergugat melakukan penganiayaan dan kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh dan akibat hukum dari cerai gugat dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, sumber data berasal dari data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dalam bentuk teks naratif, kemudian dianalisis secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat Nomor 3/Pdt.G/2022/PA.Lbh mendasarkan pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut peneliti, terdapat beberapa pasal lain yang juga dapat ditambahkan pada pertimbangan hakim yaitu Pasal 19 huruf (d) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam mengenai alasan perceraian yaitu salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Akibat hukum dari cerai gugat pada putusan tersebut adalah akibat terhadap hubungan suami istri dan harta bersama. Terhadap hubungan suami istri yaitu putusnya hubungan antara Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri serta berakhirnya hak dan kewajiban suami istri antara keduanya. Penggugat berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah* karena tidak terbukti *nusyuz*. Terhadap harta bersama adalah Penggugat berhak atas harta bersama dengan jumlah seperdua dari total harta bersama.

Kata Kunci: *Cerai Gugat, Penganiayaan, Kekerasan Seksual*

DIVORCE SUIT DUE TO PERSECUTION AND SEXUAL VIOLENCE
**(Juridical Review of the Decision of the Labuha Religious Court Number
3/Pdt.G/2022/PA.Lbh)**

By:
ANNISA CRYSAINTI
E1A020133

ABSTRACT

Marriage is a sacred event for the people who performs it. One of the main goals of marriage is to form a harmonious family, create a happy atmosphere, and achieve tranquility and comfort for husbands, wives, and other family members, but in the reality not all families can realize the purpose of marriage. This is because there are several factors that cause the breakup of marriage. In Decision Number 3/Pdt.G/2022/PA. Lbh, the Plaintiff filed for divorce against the Defendant due to a dispute arising from the Defendant committing Persecution and Sexual Violence.

The formulation of this research problem is how the judge's legal considerations in deciding case Number 3/Pdt.G/2022/PA. Lbh and what are the legal consequences of divorce lawsuit in the judgment. This research uses a normative juridical type of research with case, statutory, and conceptual approach methods, and the research specification is descriptive analytical. The data sources used are secondary data with data collection using literature studies in the form of narrative texts, then analyzed normatively qualitatively.

Based on the results of the study, it can be seen that the judge's consideration in granting divorce lawsuit Number 3/Pdt.G/2022/PA. Lbh Based on the Explanation of Article 39 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 regarding divorce, there must be sufficient reasons that the husband and wife will no longer be able to live together as husband and wife, Article 19 letter (f) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law regarding the reasons for divorce, namely between husband and wife there are continuous disputes and quarrels and there is no hope that they will live in harmony again in the household. According to the researchers, there are several other articles that can also be added to the judge's consideration, namely Article 19 letter (d) of Government Regulation Number 9 of 1975 jo. Article 116 letter (d) of the Compilation of Islamic Law regarding the grounds for divorce, namely one-party committing cruelty or serious maltreatment that endangers the other party and Article 5 of Law Number 23 of 2004 concerning everyone is prohibited from committing domestic violence. The legal consequences of a contested divorce in the decision are the effects on the relationship between husband and wife and joint property. The relationship between husband and wife is the termination of the relationship between the Defendant and the Plaintiff as husband and wife and the end of the rights and obligations of husband and wife between the two. The plaintiff is entitled to mut'ah and iddah alimony because there is no evidence of nusyuz. Regarding joint property, the Plaintiff is entitled to joint property in the amount of one-half of the total joint property.

Keywords: *Divorce Suit, Persecution, Sexual Violence*